



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

18. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar setiap tahunnya.

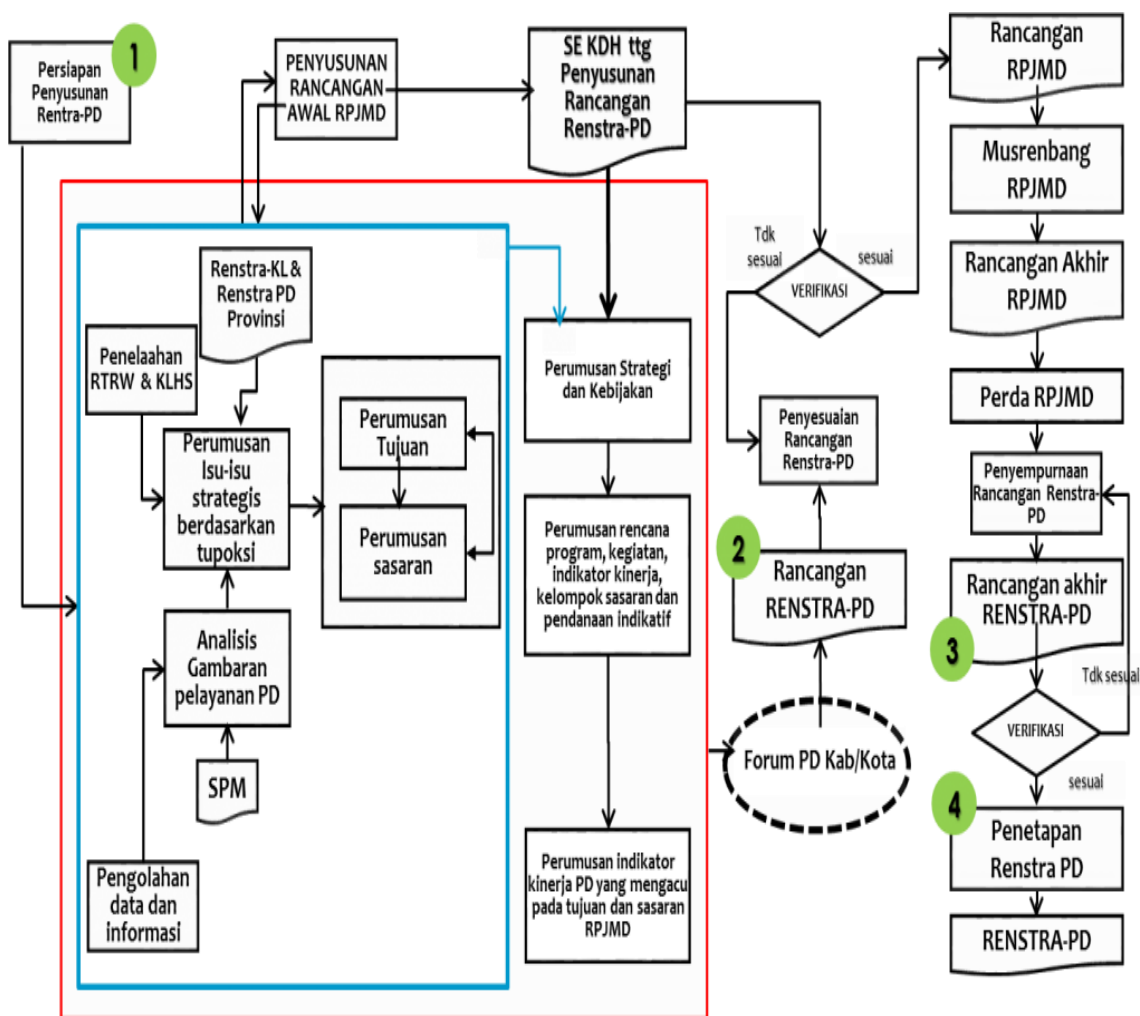
Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2022-2026

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sebagaimana salah satu misi RPJMD yaitu Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital, peran utama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah memberikan pembinaan kepada Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja perlu dilakukan perubahan, yang pertama sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan perubahan Peraturan Wali Kota Blitar 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, serta perubahan kedua dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur indikator kinerja utama agar konsisten dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UM dan Naker Kota Blitar Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan.
2. Penetapan alokasi Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2024 untuk bidang Pendidikan sub bidang Perpustakaan sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024. Untuk itu perlu dilakukan penambahan sub kegiatan baru mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHCHT TA 2023 dan DAK TA 2023.
3. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor: 050/775/410.201.3/2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023;

35. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
43. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan bidang koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di Kota Blitar. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja, yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan

Tenaga Kerja Kota Blitar.

- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi tahun lalu sebagai bagian dari evaluasi agar masalah dan kendala serupa tidak lagi muncul.
- c. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.
- d. Sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang pada tahun sebelumnya dapat dikategorikan memuaskan karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal.
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar setiap tahun.
- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
BAB VII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- d. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
- g. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
- k. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
- l. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- m. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
- n. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
- o. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi,

usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;

- p. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- q. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 3. Bidang Pemberdayaan Koperasi
- 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 4. Bidang Ketenagakerjaan
- 5. UPT Dana Bergulir; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja hingga tahun 2023 mencapai 42 Orang, dengan rincian 27 orang berstatus PNS 2 orang berstatus PTT, tenaga PPKL dari kementerian 3 orang, tenaga pendamping 1 orang dan untuk THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 9 orang.

Dari total tersebut, 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 1 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 13 orang, berpendidikan diploma (D3) sebanyak 1 orang dan berpendidikan SLTA/SMP

sebanyak 17 orang.
Adapun rincian sumber daya aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2023 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

No	Pangkat/ Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	0	1	1
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	2	8	10
4.	Penata (III/c)	0	1	1
5.	Penata Muda Tk I (III/b)	0	1	1
6.	Penata Muda (III/a)	2	2	4
7.	Pengatur Tk I (II/d)	4	1	5
8.	Pengatur (II/c)	0	0	0
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
11.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
12.	Juru (I/c)	0	0	0
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
14.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
JUMLAH		10	15	25
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	0	1
2.	Sarjana (S1)	4	12	16
3.	Diploma	0	1	1
4.	SLTA	5	2	7
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
JUMLAH		10	15	25
JABATAN				
1.	Pejabat Struktural	2	6	8
2.	Jabatan Fungsional Khusus	2	6	8
3.	Jabatan Fungsional Umum	6	3	9
JUMLAH		10	15	25
STATUS KEPEGAWAIAN				
1.	PNS	10	15	25
2.	CPNS	0	0	0
JUMLAH		10	15	25

- b. Sarana dan Prasarana
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan

pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai.
Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

No .	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	3	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	6	Baik
4.	Komputer	3	Baik
5.	Laptop	11	Baik
6.	Printer	7	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	1	Baik
9.	Brankas	4	Baik
10.	Telepon	1	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	5	Baik

- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2017-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I	Indikator Tujuan																
	Persentase Peningkatan PDRB sector Usaha Mikro(Sasaran Kota)				15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	14,18	15,91	15,96	15,96	89,52	100,44	100,76	100,76
II	Indikator Sasaran																
	Persentase Koperasi Aktif (IKU)				72	73	80	82	85	72	75,59	80,58	87,41	100	103,55	100,74	106,60
	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri (IKU)				72	75	80	81	82	72	79,71	89,13	86,7	100	106,28	111,41	107,04
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (IKU)				1	1,5	1,6	1,7	1,72	1	1,52	1,67	0,09	100	101,33	104,38	5,29
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro (IKU)				0,2	0,5	1	1,5	2	0,2	1,27	3,75	3,24	100	254	375	216
III	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																
	Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha						80	82	85			80,59	87,41			100,74	106,60
	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha						1,6	1,70	1,72			1,67	0,09			104,38	5,29
	Persentase Usaha Mikro yang terbina						1	1,50	2			3,75	95,00			375	475

Tabel 2.3.2
Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	72	72	75,59	80,58	87,41
1.1	Jumlah koperasi aktif	245	245	257	274	243
1.2	Jumlah koperasi	340	340	340	340	278
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina	61.85	-0.15	2,14%	3,75%	3,82
2.1	Jumlah usaha mikro yang dibina	157	133	255	425	475
3.	Persentase koperasi dengan permodalan mandiri	NA	NA	80,88 %	89,16%	86,70 %
3.1	Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri	NA	NA	275	303	241
3.2	Jumlah koperasi	NA	NA	340	340	278
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru menjadi usaha mikro	NA	NA	1,27	3,75	3,24
4.1	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n – (th n-1))	NA	NA	12	57	264
4.2	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n)	NA	NA	67	50	1127

____Sumber : Dinas Koperasi dan UM , 2020

Tabel 2.3 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 – 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Real isasi
BELANJA DAERAH															
Belanja Tidak Lang sung			2.913.869.132	2.406.173.796	-			2.286.704.043	1.970.297.364			78,48	81,89		
Belanja Langsung															
Belanja Pegawai			-	-	2.585.077.489			-	-			-	-		
Belanja Barang dan Jasa			2.411.810.300	1.701.933.200	2.170.853.450			2.344.791.572	1.683.718.854			97,22	98,93		
Belanja Modal			111.240.000	124.680.200	-			110.955.000	124.495.900			99,74	99,85		
TOTAL		2.278.897.500	5.436.919.432	4.323.787.196	4.755.930.939		2.233.316.530	4.742.450.615	3.778.512.118						

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2017 – 2020 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (RapatAnggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus : $\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif} \times 100}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}}$

Tabel 2.3.3
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2020 Kota Blitar

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Koperasi aktif	245	257	274	243
2.	Jumlah Koperasi	340	340	340	278
3.	Total Persentase Koperasi Aktif	72	75,59	80,58	87,41

Disisi lain hasil pendataan pelaku usaha mikro di Kota Blitarsebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.3.4
Data Pelaku Usaha Mikro Tahun 2017-2020 Kota Blitar

NO	TAHUN	Wira Usaha Baru	Usaha Mikro	Usaha Kecil	TOTAL
1	2017	306	11.354	801	12.461
2	2018	345	11.414	819	12.578
3	2019	310	11.434	773	12.517
4	2020	1.315	12.437	810	14.562

Pandemi tahun 2020 berdampak terhadap penurunan omset usaha pelaku usaha mikro, hal ini diakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi. Karena itulah, sebagian pelaku usaha mengambil langkah cepat agar tidak terlalu mengalami keterpurukan dalam sektor ekonomi dan mampu bertahan ditengah pandemi.

Hal-hal yang dilakukan untuk bertahan ditengah pandemi, para pelaku usaha menerapkan beberapa strategi dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya.

Adapun strategi lain yang diterapkan meliputi :

1. mengatur keuangan dan membuat skala prioritas Keuangan
2. mengubah cara berjualan dari *offline* menjadi online
3. inovasi (produk, pemasaran, model bisnis, dan lainnya), memperbaiki kualitas produksi, membaca literatur dan berita mengenai perilaku konsumen

Disamping itu pemerintah juga membantu dan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM antara lain bantuan berupa bingkisan bahan pokok kepada pelaku usaha mikro terdampak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran kementerian Koperasi dan komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran dan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
2. Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
3. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
4. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro masih kurang bersaing.
5. Kurangnya pemahaman peinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
6. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan Usaha Mikro

b. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Wali Kota Blitar terhadap pelaksanaan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang intensif

dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

6. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,
UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD Propinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Kota Blitar

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan / Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
1	Belum Optimal nya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro kurang professional Terbatasnya tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang kompeten Permodalan masih rendah	Badan usaha lain bisa bebas memasuki bidang usaha yang ditangani oleh koperasi Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi/koperasi kurang diminati oleh masyarakat khususnya generasi muda Modal usaha hanya dari simpanan anggota Perlunya Jaminan untuk memperoleh pinjaman

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan / Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
2	Tingginya Tingkat Pengangguran	Terbatasnya kesempatan kerja	Rendahnya penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja Rendahnya keseuaian ketrampilan pencari kerja dgn permintaan pasar tenaga kerja

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pembinaan.
2. Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas tugas pembinaan koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021- 2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan

- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina Koperasi dan Usaha Mikro mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

Misi tersebut oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pembinaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Koperasi Usaha Mikro
2. Peningkatan Pemasaran hasil produksi Koperasi Usaha Mikro
3. Peningkatan nilai Produksi Usaha Mikro sebagai barang ekspor.
4. Peningkatan kesempatan kerja

Telaahan visi misi dan program Walikota Blitar memuat kesinambungan dengan RPJMD yaitu Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar 2021-2026 adalah pada Program Blitar Makmur, dimana terdapat 2 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, diantaranya dengan konsep operasional Program Unggulan Inovatif “Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-Up Community”.

Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru, berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang.

Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain:

Tabel 3.3.1
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD
Jawa Timur 2014 – 2019 terkait Koperasi
dan UMKM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1. Memperluas akses	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha
UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank		2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>
		3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	
	2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
		3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional
		4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra- sentra produksi/klaster disertai dukungan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyediaan infrastruktur yang makin memadai
		5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil
		6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangankoperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.
2. Meningkatkan jumlah wirausaha baru (WUB)	3. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
3. Meningkatkan volume usaha ekonomi kaum perempuan	4. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
		2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
		3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan
		4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Permendagri tentang Kebijakan pembinaan K-UKM di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pembinaan K-UKM diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS bagi lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja secara hirarki tidak secara langsung mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Akan tetapi dalam Renstra ini ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ada Program yang berkaitan dengan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yaitu Program Pemberdayaan Usaha Kecil & Menengah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar;
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM pelaku Usaha Mikro;
3. Perlu peningkatan Pemasaran hasil produksi usaha mikro;
4. Perlu peningkatan nilai produksi usaha mikro sebagai barangekspor;
5. Perlu peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan sesuai dengan minat dan bakat;
6. Melaksanakan pendampingan bagi alumni pelatihan yang memilki bakat, kemampuan dan kemauan untuk berwirausaha;
7. Melaksanakan penempatan kerja melalui pemagangan kerja.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah 1. Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro

terhadap Perekonomian Daerah.

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran.

Indikator Tujuan nya adalah

1. Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPA)

Sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka

pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif
Indikator Sasaran : Persentase Koperasi Aktif
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi
Indikator Sasaran :
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)
3. Meningkatnya Omzet Usaha Mikro
Indikator Sasaran : Persentase Usaha Mikro yang naik kelas
4. Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru
Indikator Sasaran: Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
5. Meningkatnya kompetensi pencari kerja
Indikator: Persentase pencari kerja yang berkompeten
6. Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan
Indikator Sasaran: Persentase Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA TAHUN 2022 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran				Target kinerja Akhir Periode
						2020	2022		2023		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi /Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	Persen	2,02	2,05	2,776	2,1	2,776	2,25
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), Melaksanakan RAT setiap Tahun	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	Persen	35	35,60%	48,90%	36,70%	48,90%	39,5%
	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	(Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya) x 100%	Persen	34	35%	39%	36%	39%	39%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran				Target kinerja Akhir Periode
						2020	2022		2023		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >2M /tahun (sesuai PP No.7 Tahun 2021)	(Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n) x 100%	Persen	1,72	1,80%	1,83%	1,85%	1,83%	2%
	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Wira Usaha Baru adalah : Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	(Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1) x 100%	Persen	NA	1,60%	1,62%	1,75%	1,62%	2%
Menurunnya tingkat pengangguran		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Persen	69,53	70,00	67,78	70,50	67,78	72,00
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Persen	NA	80%	66%	82%	70%	90%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran				Target kinerja Akhir Periode
						2020	2022		2023		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Persen	NA	16%	30%	18%	30%	22%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah									
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai	83,36 (A)	83,56 (A)	83,18 (A)	83,56 (A)	81,14 (A)	85,00 (A)

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA TAHUN 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Akhir Periode
						2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Jumlah Nilai Tambah dari Koperasi dan Usaha Mikro Tahun n	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi / Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	Persen	2,71	2,776	2,15	2,2	2,26	2,26
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahnya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan, Melaksanakan RAT setiap Tahun	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	Persen	35,6	48,9%	37,8%	38,8%	39,5%	39,5%
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	(Jumlah Koperasi yang naik kualitas kesehatannya /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	Persen	35	39%	37%	38%	39%	39%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Akhir Periode
						2021	2022	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >2M /tahun (sesuai PP No.7 Tahun 2021)	(Jumlah UM yang omzetnya naik / Jumlah UM seluruhnya) x 100%	Persen	1,80	1,83%	1,9%	1,95%	2%	2%
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Wira Usaha Baru adalah : Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	(Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1) x 100%	Persen	1,60	1,62%	1,9%	1,95%	2%	2%
		Nilai Tambah Usaha Mikro	Jumlah Nilai Tambah dari Usaha Mikro Tahun n	Nilai Tambah = Out Put - Biaya Antara	Persen	NA	NA	2,15%	2%	2,26%	2,26%
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja Tahun n	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Persen	69,96	67,78	71	71,5	72	72
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Persen	80%	66%	85%	87%	90%	90%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Akhir Periode
						2021 NA	2022 NA	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun n - jumlah tenaga terserap tahun n-1/jumlah tenaga terserap tahun n-1 x 100%	Persen			16	18	20	20
	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Persen	18%	30%	19	21	22	22
		Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Jumlah Permasalahan Tenaga Kerja Tahun n	Jumlah permasalahan ketenagakerjaan tahun n - jumlah permasalahan ketenagakerjaan tahun n-1/ permasalahan ketenagakerjaan tahun n-1 x 100%	Persen	NA	NA	19	21	22	22

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Akhir Periode
						2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai	83,36 (A)	83,18 (A)	84 (A)	84,25 (A)	84,5 (A)	84,5 (A)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	Nilai	83,36 (A)	83,18 (A)	84 (A)	84,25 (A)	84,5 (A)	84,5 (A)

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Tabel 5.1

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength/S</i>)	Kelemahan
Faktor Eksternal	1. Meningkatnya koperasi aktif 2. Meningkatnya jumlah UM dan WUB 3. Sudah terdapatnya Kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten 2. Database UM masih belum sepenuhnya update dan detail 3. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM 4. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi
Peluang/ <i>Opportunity/</i> (O) 1. Kebijakan pemerintah daerah yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan 2. Standarisasi produk nasional 3. Adanya pemeringkatan koperasi 4. Globalisasi	Strategi SO 1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM 3. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi	Strategi WO 1. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi 3. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

perdagangan khususnya ASEAN Economy Community (AEC)		
Tantangan 1. Struktur dan Persaingan usahayang tidak seimbang 2. Regulasi yang sering Berubah 3. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif Ketergantungan bahan baku impor	1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM	1. Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM 2. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat							
MISI : 3. Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital							
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkat nya pertumbuhan ekonomi	Meningkat nya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian an daerah	Meningkat nya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian an daerah	Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro Perekonomian daerah	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Peningkatan nilai produksi usaha mikro	1. Peningkat an Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro 3. Peningkatan Nilai Produksi Usaha Mikro sebagai barang ekspor
					Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)		
				Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas		
					Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru		
					Nilai Tambah Usaha Mikro		

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI : 3. Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Peningkatan kesempatan kerja	1. peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
				Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja		2. Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
				Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Peningkatan penyelesaian konflik industrial	Optimalisasi mediasi konflik industrial
					Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan		
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2021- 2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR TAHUN 2022

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	URUSAN KOPERASI DAN UKM										
2.17	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	83,18	3.942.316.627	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
2.17	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	83,18	3.942.316.627	Sekretariat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Thn n	Angka	80,87	81	3.199.453.439	81,50	3.942.316.627		
2.17.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100%	100%	10.039.600	100	10.039.600		
2.17.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	2	2	5.769.700	2	5.769.700		
2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	3	3	4.269.900	3	4.269.900		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.17.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	%	100%	100%	2.602.197.489	100	3.190.685.267		
2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang	21	23	2.602.197.489	21	3.190.685.267		
2.17.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{100%jumlah jenisadministrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	%	100%	100%	200.000.000	100	37.508.600		
2.17.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada thn n	Event		2	200.000.000	2	37.508.600		
		Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada thn n	Publikasi		2		2			
2.17.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan}} \times 100\%$	%	100%	100%	222.124.350	100	430.182.137		
2.17.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Komponen		15	4.792.600	15	4.792.600		
2.17.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Macam		2	1.493.800	2	1.493.800		
2.17.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Jenis		12	11.408.800	12	11.408.800		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.17.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada thn n	Jenis		29	31.265.200	29	262.190.054		
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada thn n	Dos		750		750			
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia pada thn n	Porsi		150		150			
2.17.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Jenis		8	27.319.200	8	27.301.200		
2.17.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Eksempl ar		24	5.400.000	24	2.700.000		
2.17.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Rakor		17	140.444.750	17	120.295.683		
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar yang tersedia pada tahun n / Jumlah jasa penunjang urusan PD x 100%	%	100%	100%	48.089.200	100	56.328.809		
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan thn n	Rekenin g		4	48.089.200	4	56.328.809		
2.17.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100%	100%	117.002.800	100	217.572.214		
2.17.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada thn n	Unit		3	75.376.400	3	76.076.342		
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya pada thn n	Unit		10		10			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.17.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada thn n	Unit		1	22.280.000	1	122.149.472		
2.17.01.209.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada th n	Jenis		3	19.346.400	3	19.346.400		
		Jumlah peralatan gedungkantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedungkantor yang terpelihara pada thn n	Jenis		3		3			
	Tujuan : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Persen	69,53	70	960.074.050	67,78	2.387.448.278	Bidang Ketenagakerjaan	Kota Blitar
	Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Persen	NA	80	902.344.950	66	2.290.298.678		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Jumlah alumni pelatihan yg telah bekerja/jumlah alumni pelatihan X 100%	Persen	47,7	46	809.381.850	56	2.290.298.678		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Peserta pelatihan yang lulus dengan nilai minimal 80/ peserta pelatihan x100%	Persen	NA	82	809.381.850	83	2.290.298.678		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi pada thn n	orang	42	160	809.381.850	466	2.290.298.678		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja ditempatkan/jumlah pencari kerja X 100%	Persen	82,98	77	92.963.100	85,56	310.276.366		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Jumlah pencari kerja di bursa kerja online resmi pemerintah yang ditempatkan/jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan X 100%	Persen	0	12		0			
	Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	383	170	41.346.100	289	286.616.866		
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi		150	150	41.346.100	150	286.616.866		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja/ pencari kerja yg mengakses informasi pasar kerja X100%	Persen	NA	30%	51.617.000	31	23.659.500		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	orang	NA	100	50.000.000	0	0		
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	orang	NA	30	1.617.000	35	23.659.500		
	Sasaran : Meningkatkan perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Persen	NA	16	57.729.100	30	97.149.600	Bidang Ketenagakerjaan	Kota Blitar
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan/jumlah perselisihan industrial yang diproses x 100%	Persen	100%	100	57.729.100	100	97.149.600		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	25	55	57.729.100	55	97.149.600		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi UMK dan peraturan ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Tahun n	Orang	300	75	26.031.500	75	71.569.000		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diproses	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Tahun n	Kasus	9	1	8.594.700	0	1.071.000		
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen hasil verifikasi/rekomendasi bidang ketenagakerjaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Tahun n	Dokumen	1	1	23.102.900	1	24.509.600		
	Tujuan : Meningkatkan nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi / Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	%	2,02	2,05		2,776	1.942.852.517	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
	Sasaran : Meningkatkan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	%	35	35,60%	404.040.250	48,90	453.889.100	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Rekomendasi Ijin Usaha SP yg diterbitkan / Jumlah Permohonan Ijin Usaha SP x 100%	%	21	22	34.255.200	30,3	54.628.000		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan pada Thn n	Koperasi	NA	3	34.255.200	4	54.628.000		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah pada thn n	Koperasi	NA	10	34.255.200	10	54.628.000		
		Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata	Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata pada thn n	Koperasi	278	278		282			
		Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi pada thn n	Koperasi		50		111			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Jumlah SDM koperasi yg mendapatkan kapasitas thn n / Jumlah SDM koperasi seluruhnya thn n x 100%	%	35	35,7	369.785.050	17,69	399.261.100		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Jumlah koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Orang	65	71	369.785.050	75	399.261.100		
	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Jumlah peserta pelatihan IT	Jumlah peserta pelatihan IT pada thn n	Orang		40	369.785.050	40	399.261.100		
		- Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pada thn n	Orang		80		80			
		- Jumlah peserta pelatihan perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian pada thn n	Orang		80		80			
		- Jumlah laporan monev pelatihan	Jumlah laporan monev pelatihan pada thn n	Laporan		1		1			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Sasaran : Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	(Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya) x 100%	%	34	35	390.192.900	39	614.679.100	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yg patuh th n- Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 /Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 x 100%	%	32	33	111.629.100	28,97	186.605.000		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi, KSP/USP yang diperiksa dan diawasi / Jumlah koperasi, KSP/USP seluruhnya x 100%	%	27	28	111.629.100	39,36	186.605.000		
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev pada thn n	Koperasi		80	11.629.100	86	86.605.000		
		Jumlah laporan monev	Jumlah laporan monev	Laporan		1		1			
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah	Jumlah lembaga penerima hibah	Lembaga		1	100.000.000	1	100.000.000		
		Jumlah laporan monev pemeriksaan lembaga penerima hibah	Jumlah laporan monev pemeriksaan lembaga penerima hibah	Laporan		1		1			
		Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan pada thn n	Koperasi		78		111			
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Jumlah Koperasi yg sehat th n- Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 /Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 x 100%	%	28	29	65.383.200	28,97	65.382.200		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi / Jumlah koperasi yg telah mendapatkan sosialisasi penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi x 100%	%	100	100	65.383.200	100	65.382.200		
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	Orang		100	65.383.200	111	65.382.200		
		Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	Orang		100		111			
		Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi		100		111			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	%	30	32	213.180.600	24,08	362.691.900		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	Jumlah koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi / Jumlah anggota koperasi seluruhnya x 100%	%		11	213.180.600	11	362.691.900		
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah koperasi peserta pameran produk unggulan	Jumlah koperasi peserta pameran produk unggulan	Koperasi		30	213.180.600	30	362.691.900		
		Jumlah aplikasi koperasi yg di update	Jumlah aplikasi koperasi yg di update	Aplikasi		1		1			
		Jumlah koperasi yg dilakukan update data	Jumlah koperasi yg dilakukan update data	Koperasi		278		282			
		Jumlah jenis produk unggulan yang laku dijual	Jumlah jenis produk unggulan yang laku dijual	Produk		5		5			
	Sasaran : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	(Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n) x 100%	%	1,72	1,8	484.329.600	1,83	690.721.017	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	UM yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	1,72	1,8	484.329.600	1,82	690.721.017		
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	Jumlah UM yg telah melaksanakan pemasaran secara digital / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	2	2,2		2,19			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	Jumlah UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%		100	484.329.600	100	690.721.017		
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan UM yg dipromosikan / Jumlah produk unggulan UM x 100%	%		0,4		0,41			
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	Dokumen		1	86.663.900	1	86.663.900		
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UM penerima dana bergulir yang dimonev	Jumlah UM penerima dana bergulir yang dimonev	UM		25	96.994.000	50	96.990.600		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah laporan monev pengawasan dana bergulir	Jumlah laporan monev pengawasan dana bergulir	Laporan		1		1			
		Jumlah peserta pelatihan bagi UM	Jumlah peserta pelatihan bagi UM	Orang		70	84.630.500	50	202.442.867		
		Jumlah laporan Monev pelatihan	Jumlah laporan Monev pelatihan	Laporan		1		1			
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	UM		50	216.041.400	95	304.623.650		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran	Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran	Produk		5		1			
	Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	(Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1) x 100%	%		1,6	238.812.400	1,62	183.563.300	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Jumlah Wirausaha Baru yg berhasil dikembangkan / Jumlah Wirausaha Baru x 100%	%	1,5	1,6	238.812.400	1,76	183.563.300		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	Jumlah kelurahan yang memiliki WUB minimal 2 / Jumlah kelurahan seluruhnya x 100%	%		100	238.812.400	100	183.563.300		
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	Orang		100	238.812.400	175	183.563.300		
		- Jumlah calon WUB yang didampingi	- Jumlah calon WUB yang didampingi	Orang		50		50			

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR TAHUN 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
	URUSAN KOPERASI DAN UKM							
2.17	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	83,56	4.470.054.614	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
2.17	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	83,56	4.470.054.614	Sekretariat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun	Angka	81,50	4.470.054.614		
2.17.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- $\times 100\%$ Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100%	46.365.470		
2.17.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	5	6.365.970		
2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	4	39.999.500		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
2.17.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100 \%$	%	100%	3.638.404.480		
2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang	27	3.635.435.502		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	2.968.978		
2.17.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	%	100%	84.023.784		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	2	56.250.000		
2.17.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	50	27.773.784		
2.17.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan}} \times 100\%$	%	100%	213.369.936		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
2.17.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	4.999.648		
2.17.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	27.415.515		
2.17.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	11.543.579		
2.17.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	10	22.247.900		
2.17.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	24.656.244		
2.17.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	1.920.000		
2.17.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	120.587.050		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	0	0		
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar yang tersedia pada tahun n / Jumlah jasa penunjang urusan PD x 100%	%	100%	309.547.510		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	12	48.089.200		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	12	265.200.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	47.872.564		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	25	21.072.650		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	26.799.914		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		
2.17.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara - ----- x 100%jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100%	130.470.870		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
2.17.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	10	76.710.870		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	21.910.000		
2.17.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	31.850.000		
	Tujuan : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Persen	70,5	2.274.252.500	Bidang Ketenagakerjaan	Kota Blitar
	Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Persen	82	2.078.252.500		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Jumlah alumni pelatihan yg telah bekerja/jumlah alumni pelatihan X 100%	persen	47	792.791.000		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Peserta pelatihan yang lulus dengan nilai minimal 80/ peserta pelatihan x100%	Persen	83	955.413.259		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	Orang	175	955.413.259		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja ditempatkan/jumlah pencari kerja X 100%	Persen	79	1.285.461.500		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Jumlah pencari kerja di bursa kerja online resmi pemerintah yang ditempatkan/jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan X 100%	Persen	14			
	Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	150	312.823.297		
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi		150	312.823.297		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja/ pencari kerja yg mengakses informasi pasar kerja X100%	Persen	32,7	292.209.490		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	orang	0	0		
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	orang	30	292.209.490		
	Sasaran : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Persen	18	196.000.000	Bidang Ketenagakerjaan	Kota Blitar
	PROGRAM HUBUNGAN INDUATRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan/jumlah perselisihan industrial yang diproses x 100%	Persen	100	196.000.000		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahan	75	107.729.168		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Tahun n	perkara	5	84.626.480		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Tahun n	perkara	0	0		
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Tahun n	asosiasi dan serikat pekerja	4	23.102.688		
	Tujuan : Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi / Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	%	2,1	6996853965	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	%	36,7	826.369.670	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Rekomendasi Ijin Usaha SP yg diterbitkan / Jumlah Permohonan Ijin Usaha SP x 100%	%	23	332.169.808		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan pada Thn n	unit usaha	3	332.169.808		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Thn n	unit usaha	10	332.169.808		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Jumlah SDM koperasi yg mendapatkan kapasitas thn n / Jumlah SDM koperasi seluruhnya thn n x 100%	%	36,4	494.199.862		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Jumlah koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Persen	5	90.000.000		
	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian pada Thn n	orang	50	90.000.000		
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan / Jumlah UKM seluruhnya x 100%	Persen	36,4	404.199.862		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM pada Thn n	orang	160	404.199.862		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	(Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya) x 100%	%	36	600.429.681	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yg patuh th n- Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 /Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 x 100%	%	34	22.668.589		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi, KSP/USP yang diperiksa dan diawasi / Jumlah koperasi, KSP/USP seluruhnya x 100%	%	29	22.668.589		
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Thn n	unit usaha	50	22.668.589		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Jumlah Koperasi yg sehat th n- Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 /Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 x 100%	%	30	77.761.092		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi / Jumlah koperasi yg telah mendapatkan sosialisasi penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi x 100%	%	100	77.761.092		
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi pada Thn n	unit usaha	100	77.761.092		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	%	34	500.000.000		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	Jumlah koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi / Jumlah anggota koperasi seluruhnya x 100%	%	12	375.804.627		
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Thn n	Orang	30	359.036.202		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Thn n	Keluarga	10	16.768.425		
	Sasaran : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	$(\text{Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n} / \text{Jumlah UM seluruhnya Thn n}) \times 100\%$	%	1,85	500.000.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	UM yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	1,85	500.000.000		
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	Jumlah UM yg telah melaksanakan pemasaran secara digital / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	2,3			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	Jumlah UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	100	969.864.974		
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan UM yg dipromosikan / Jumlah produk unggulan UM x 100%	%	0,5			
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Tahun n	Unit Usaha	12000	86.663.748		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro pada Tahun n	Unit Usaha	50	145.242.022		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada Tahun n	Orang	25	91.028.804		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada Tahun n	Orang	70	646.930.400		
	Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	$(\text{Jumlah WUB Thn } n - \text{Jumlah WUB Thn } n-1 / \text{Jumlah WUB Thn } n-1) \times 100\%$	%	1,75	600.000.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Jumlah Wirausaha Baru yg berhasil dikembangkan / Jumlah Wirausaha Baru x 100%	%	1,7	600.000.000		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan	Jumlah Wirausaha yg dilakukan pendampingan / Jumlah Wirausaha seluruhnya x 100%	%	100	426.311.299		
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Thn n	Unit Usaha	100	426.311.299		

Tabel 6.3
Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN KOPERASI DAN UKM													
2.17	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	84,00		84,25		84,5		84,50		Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	Kota Blitar
2.17	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Angka	84,00		84,25		84,5		84,50		Sekretariat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun	Angka	82,00	5.498.700.000	82,50	4.646.700.000	83,00	5.321.700.000	83,00	23.879.471.241		
2.17.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100%	56.500.000	100%	56.500.000	100%	56.500.000	100%	215.865.470		
2.17.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	25.865.970		
2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	189.999.500		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
2.17.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100 %	3.653.000.000	100 %	3.753.000.000	100%	3.853.000.000	100 %	14.897.404.480		
2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang	27	3.650.000.000	27	3.750.000.000	27	3.850.000.000	27	14.885.435.502		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	11.968.978		
2.17.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100 %	111.250.000	100 %	111.250.000	100%	111.250.000	100 %	417.773.784		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	2	56.250.000	2	56.250.000	2	56.250.000	2	225.000.000		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.01.2 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	50	55.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	50	192.773.784		
2.17.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	%	100 %	232.750.000	100 %	232.750.000	100%	232.750.000	100 %	911.619.936		
2.17.01.2 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	24.499.648		
2.17.01.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	102.415.515		
2.17.01.2 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	11.750.000	1	11.750.000	1	11.750.000	1	46.793.579		
2.17.01.2 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	10	29.500.000	10	29.500.000	10	29.500.000	10	110.747.900		
2.17.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	28.500.000	1	28.500.000	1	28.500.000	1	110.156.244		
2.17.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Doku men	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	9.420.000		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Lapor an	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	495.587.050		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Doku men	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	-	12.000.000		
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar yang tersedia pada tahun n / Jumlah jasa penunjang urusan PD x 100%	%	100%	310.200.000	100%	310.200.000	100%	310.200.000	100%	1.240.147.510		
2.17.01.208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	183.089.200		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	12	265.200.000	12	265.200.000	12	265.200.000	12	1.060.800.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	875.000.000	100	50.000.000	100	625.000.000	100	1.597.872.564		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	2	50.000.000		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	50	150.000.000	10	25.000.000	5	50.000.000	65	246.072.650		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	50.000.000	2	25.000.000	5	50.000.000	10	151.799.914		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	2	1.000.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	150.000.000	0	0	0	0	-	150.000.000		
2.17.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100%	260.000.000	100%	133.000.000	100%	133.000.000	100%	654.470.870		
2.17.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	10	75.500.000	10	75.500.000	10	75.500.000	10	303.210.870		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	15	12.000.000	0	0	0	0	15	12.000.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	22.500.000	10	22.500.000	10	22.500.000	10	89.410.000		
2.17.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	150.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	251.850.000		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		/Direhabilitasi												
	Tujuan : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	Perse n	71	2.387.716.000	71,5	2.508.962.000	72	2.604.862.000	72	9.775.792.500	Bidang Ketenagakerjaan	Kota Blitar
	Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	(Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Perse n	85	2.181.916.000	87	2.292.781.000	90	2.377.871.000	90	8.930.820.500		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Jumlah alumni pelatihan yg telah bekerja/jumlah alumni pelatihan X 100%	perse n	48	832.431.000	49	874.053.000	50	917.756.000	50	4.226.412.850		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Peserta pelatihan yang lulus dengan nilai minimal 80/ peserta pelatihan x100%	Perse n	85	832.431.000	87	874.053.000	89	917.756.000	89	4.226.412.850		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	Orang	175	832.431.000	150	874.053.000	150	917.756.000	475	4.226.412.850		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja ditempatkan/jumlah pencari kerja X 100%	Perse n	81	1.349.485.000	82	1.418.728.000	83	1.460.115.000	83	5.606.752.600		
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Jumlah pencari kerja di bursa kerja online resmi pemerintah yang ditempatkan/jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan X 100%	Perse n	16		18		20		20			
	Pelayanan Antarkerja di daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	230	53.090.000	260	55.744.000	260	58.532.000	260	480.189.297		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi Thn n	Orang	2	53.090.000	50	55.744.000	50	58.532.000	150	480.189.297		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja/ pencari kerja yg mengakses informasi pasar kerja X100%	Perse n	33,3	323.795.000	35,4	339.984.000	37,1	356.983.000	37,1	1.312.971.490		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub) Thn n	orang	120	55.125.000	130	57.880.000	140	60.774.000	140	173.779.000		
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja Thn n	orang	46	268.670.000	46	282.104.000	52	296.209.000	52	1.139.192.490		
	Sasaran : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Perse n	19	205.800.000	21	216.181.000	22	226.991.000	22	902.701.100	Bidang Ketenagakerjaa n	Kota Blitar
	PROGRAM HUBUNGAN INDUATRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan/jumlah perselisihan industrial yang diproses x 100%	Perse n	100	205.800.000	100	216.181.000	100	226.991.000	100	902.701.100		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perus ah aan	85	205.800.000	90	216.181.000	100	226.991.000	100	756.701.168		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kab/Kota													
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Tahun n	perkar	5	157.500.000	5	165.375.000	5	173.644.000	5	581.145.480		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Thn n	perkar	4	22.050.000	5	23.153.000	5	24.311.000	5	69.514.000		
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Tahun n	asosiasi dan serikat pekerja	4	26.250.000	4	27.653.000	4	29.036.000	4	106.041.688		
	Tujuan : Meningkatkan nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi /Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	%	2,15	8.082.900.000	2,2	7.410.900.000	2,25	8.185.900.000	2,25	30.676.553.965	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	%	37,8	664.200.000	38,8	694.200.000	39,5	694.200.000	39,5	2.878.969.670	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Rekomendasi Ijin Usaha SP yg diterbitkan / Jumlah Permohonan Ijin Usaha SP x 100%	%	24	170.000.000	25	200.000.000	26	200.000.000	26	414.255.200		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan pada Thn n	unit usaha	3	170.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	414.255.200		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Thn n	unit usaha	10	170.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	414.255.200		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Jumlah SDM koperasi yg mendapatkan kapasitas thn n / Jumlah SDM koperasi seluruhnya thn n x 100%	%	37,1	494.200.000	37,8	494.200.000	38,5	494.200.000	38,5	2.206.509.050		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Jumlah koperasi yang mengrimkan peserta pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Perse n	37,1	494.200.000	37,8	494.200.000	38,5	494.200.000	38,5	2.206.509.050		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian pada Thn n	orang	200	90.000.000	200	90.000.000	200	90.000.000	600	2.206.509.050		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	(Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya) x 100%	%	37	670.000.000	38	720.000.000	39	770.000.000	39	2.760.429.681	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yg patuh th n- Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 /Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 x 100%	%	35	45.000.000	36	45.000.000	37	45.000.000	37	2.611.629.100		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi, KSP/USP yang diperiksa dan diawasi / Jumlah koperasi, KSP/USP seluruhnya x 100%	%	30	45.000.000	31	45.000.000	32	45.000.000	32	157.668.589		
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola koperasi Thn n	unit usaha	90	45.000.000	90	45.000.000	90	45.000.000	90	157.668.589		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Jumlah Koperasi yg sehat th n- Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 /Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 x 100%	%	31	75.000.000	32	75.000.000	33	75.000.000	33	415.383.200		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemerik	Jumlah koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi / Jumlah koperasi yg telah mendapatkan sosialisasi	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	302.761.000		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	saan kesehatan koperasi	penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi x 100%											
	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Thn n	unit usaha	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	302.761.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	%	36	550.000.000	38	600.000.000	40	650.000.000	40	2.513.180.600		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	Jumlah koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi / Jumlah anggota koperasi seluruhnya x 100%	%	13	375.000.000	14	375.000.000	15	375.000.000	15	1.500.804.627		
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya thn n	Unit Usaha	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	76.768.425		
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi engan kenggotaan daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi engan kenggotaan daerah Kab/Kota Thn n	unit usaha	30	355.000.000	30	355.000.000	30	355.000.000	30	1.424.036.202		
	Sasaran : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	(Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n) x 100%	%	1,9	550.000.000	1,95	600.000.000	2	650.000.000	2	2.784.329.800	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	UM yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	1,9	550.000.000	1,95	600.000.000	2	650.000.000	2	2.784.329.800		
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis	Jumlah UM yg telah melaksanakan pemasaran secara digital / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	2,4		2,5		2,6		2,6			

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		digital												
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	Jumlah UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	100	930.108.000	100	610.000.000	100	555.000.000	100	3.064.972.974		
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan UM yg dipromosikan / Jumlah produk unggulan UM x 100%	%	0,5		0,5		0,5		0,5			
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro pada Tahun n	Unit Usaha	50	487.305.000	50	150.000.000	50	115.000.000	50	897.547.022		
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi thn n	unit usaha	25	116.028.000	25	115.000.000	25	95.000.000	25	417.056.804		
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terdata Thn n	unit usaha	9000	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	371.663.748		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada Tahun n	Orang	50	231.775.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	1.378.705.400		
	Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	(Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1) x 100%	%	1,9	700.000.000	1,95	750.000.000	2	750.000.000	2	3.038.812.400	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan/su b kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Jumlah Wirausaha Baru yg berhasil dikembangkan / Jumlah Wirausaha Baru x 100%	%	1,8	700.000.000	1,9	750.000.000	2	750.000.000	2	3.038.812.400		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	Jumlah kelurahan yang memiliki WUB minimal 2 / Jumlah kelurahan seluruhnya x 100%	%	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	2.626.311.299		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Thn n	Unit Usah a	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	2.626.311.299		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2022	2023
Menurunnya tingkat pengangguran	Tujuan : Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	70,50
	Sasaran : Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	80%	82%
	Sasaran : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	16%	18%
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Tujuan : Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,05	2,1
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,60%	36,70%
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	35%	36%
	Sasaran : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	1,85%
	Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	1,60%	1,75%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2022	2023
Daerah				
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56 (A)	83,56 (A)

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
Menurunnya tingkat pengangguran	Tujuan : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,00	71,50	72,00	72,00
	Sasaran : Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	85%	87%	90%	90%
	Sasaran : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	16%	18%	20%	20%
	Sasaran : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	19%	21%	22%	22%
		Persentase Penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	19%	21%	22%	22%
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Tujuan : Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,15	2,2	2,26	2,26
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	37,8%	38,8%	39,5%	39,5%
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	37%	38%	39%	39%

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
		(Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)				
	Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,9%	1,95%	2%	2%
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	1,9%	1,95%	2%	2%
		Nilai Tambah Usaha Mikro	2,15%	2%	2,26%	2,26%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	84,25 (A)	84,5 (A)	84,5 (A)
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	84,25 (A)	84,5 (A)	84,5 (A)

Tabel 7.3
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Koperasi UM dan Naker Kota Blitar

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Persen	NA	80	82	85	87	90	90
Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Persen	NA	16	18	19	21	22	22
Persentase Koperasi Aktif	Persen	35	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5	39,5
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	Persen	34	35	36	37	38	39	39
Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	1,7	1,80	1,85	1,90	1,95	2	2
Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Persen	1,5	1,60	1,75	1,90	1,95	2	2

Tabel 7.4 IKK Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sesuai RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja								
Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	80	80	82	84	85	90	90
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	0	1	2	3	4	5	5
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0	1	2	2	3	4	4
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	20	20	40	50	70	100	100
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dala dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Blitar	Persen	90	91	92	93	94	95	95
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Persen	35	35	36	37	38	39	39
Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen	1,6	1,6	1,75	1,9	1,95	2	2

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, ukm dan tenaga kerja Kota Blitar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Pemerintah Kota Blitar.